



PENGUATAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI GEN Z DI SMP DAN SMA DHARMA KARYA UT MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Nadia Nurani Isfarin¹, Seno Wibowo Gumbira², Meliza³, Hanif Hardianto⁴, Madiha
Dzakiyyah Chairunnisa⁵, Bintang Parashtheo⁶, Bahir Mukhammad⁷, Sri Wahyu Krida Sakti⁸,
Megafury Apriandhini⁹, Purwaningdyah Murti Wahyuni¹⁰

Universitas Terbuka, Banten

nadian@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Kata Kunci:
*Gen Z,
Korupsi,
Pendidikan*

Korupsi merupakan tantangan besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan moral bangsa. Pendidikan anti korupsi menjadi langkah strategis untuk membentuk generasi muda yang berintegritas dan memiliki kesadaran akan pentingnya etos kerja dan transparansi. Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan anti korupsi Bagi Gen Z di SMP dan SMA Dharma Karya UT dengan fokus menciptakan kesadaran moral dan pemahaman mendalam tentang bahaya korupsi. Metode pelaksanaan program ini terdiri dari empat tahapan utama: integrasi kurikulum pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang melibatkan pendampingan guru dalam pengembangan materi pembelajaran dan silabus; pengembangan modul interaktif pendidikan anti korupsi yang dirancang khusus untuk remaja dengan pendekatan multimedia; kampanye sosial yang melibatkan diskusi publik dengan narasumber ahli serta lomba TikTok yang mengajak siswa berkreasi dalam menyampaikan pesan anti korupsi melalui platform media sosial, serta diskusi anti korupsi bagi Gen Z. Hasil dari program ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman Gen Z tentang korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan mereka, serta menumbuhkan kesadaran kolektif tentang urgensi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dampak bagi mitra, yakni SMA Dharma Karya UT, akan terlihat dalam meningkatnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam pengajaran, serta partisipasi aktif siswa dalam kampanye anti korupsi. Dengan dukungan yang berkelanjutan, program ini diharapkan menjadi model penguatan pendidikan anti korupsi di tingkat sekolah menengah yang berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045 yang bebas dari korupsi.

A. Pendahuluan

Pendidikan antikorupsi sangat mendesak di Indonesia, mengingat korupsi mempunyai dampak luas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, namun juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan lembaga penegak

hukum. Dampak korupsi mampu mendistorsi distribusi pendapatan, menghambat investasi, menyebabkan inefisiensi dan pemborosan sumber daya, serta merugikan demokrasi dan etika (Ertimi & Saeh, 2013). Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir berdasarkan putusan tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi (Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbulkannya - ACLC KPK, t.t.)

Tabel 1. Kerugian Negara Akibat Korupsi

Tahun	Kerugian Negara
2013	Rp3,46 triliun
2014	Rp10,69 triliun
2015	Rp1,74 triliun
2016	Rp3,08 triliun
2017	Rp29,42 triliun
2018	Rp9,29 triliun
2019	Rp12 triliun
2020	Rp56,74 triliun
2021	Rp62,93 triliun
2022	Rp48,79 triliun

Kesadaran terhadap korupsi merupakan upaya preventif yang penting untuk membangun generasi yang lebih sadar akan nilai-nilai integritas, kejujuran dan tanggung jawab. Tujuannya adalah untuk menciptakan budaya antikorupsi yang kuat di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan dan agen perubahan, dengan menanamkan pemahaman tentang bahaya korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi memainkan peran kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi pada peringatan 100 tahun kemerdekaannya.

Pada tahun 2045, generasi yang sekarang mendapat pendidikan anti-korupsi akan berada pada usia produktif dan berperan penting dalam sektor pemerintahan, bisnis, dan masyarakat. Generasi ini, yang telah dibekali dengan pemahaman dan komitmen terhadap anti-korupsi, diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang baik, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong efisiensi serta transparansi dalam berbagai bidang.

Generasi Z memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi *Indonesia Emas 2045*, mengingat mereka akan berada di posisi pemimpin dan pengambil keputusan pada tahun 2045. Generasi Z adalah individu yang lahir setelah tahun 1995 yang sangat memahami teknologi (Nichols & Wright, 2018). Beberapa karakteristik

generasi Z antara lain: lahir sekitar milenium , tidak mengenal dunia tanpa internet, menggunakan internet dan jejaring sosial, fleksibel, cerdas, toleran terhadap budaya yang berbeda, konsumen dan penyedia informasi, multitasking, memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang lebih cepat, tidak terpaku pada satu tempat, belajar, berteman, bersenang-senang dengan cara yang berbeda , tidak ada kepekaan hukum dalam mengunduh, mengubah file, dan keetidakmampuan emosional (Csobanka, 2016).

Generasi Z diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan. Dengan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap teknologi, mereka memiliki peluang untuk memanfaatkan kecerdasan buatan, analitik data, dan teknologi Lianna untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan bebas korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi dan penguatan nilai-nilai integritas menjadi sangat penting bagi Generasi Z agar memiliki integritas tinggi dalam ketika menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045.

Saat ini sebagian generasi Z merupakan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pemilihan SMA dan SMP sebagai mitra Pendidikan anti korupsi karena sekolah memiliki seprangkat kurikulum, sumberdaya manusia, sarana dan organisasi yang mendukung integrasi Pendidikan anti korupsi secara komprehensif. SMP dan SMA Dharma Karya UT, sebagai lembaga pendidikan tingkat menengah, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang memiliki integritas tinggi dan kepedulian terhadap prinsip-prinsip anti korupsi. Melalui penguatan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah, dimulai dari kesadaran akan konsep korupsi hingga implementasi nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

SMA Dharma Karya UT merupakan SMA yang terletak di Jalan Talas II/30 Pondok Cabe Ilir Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sekolah ini memiliki jumlah guru sebanyak 22 orang dengan prosentase guru yang telah tersertifikasi sebesar 13,64% dan guru yang memiliki kualifikasi mengajar sebesar 68,18%. Dengan Jumlah siswa sebanyak 390 yang terbagi atas 13 kelas (Kelas x, kelas XI, dan kelas XII), sekolah ini memiliki rasio siswa:guru 1:18 (*Data Pokok SMAS DHARMA KARYA UT - Pauddikdasmen, t.t.*) SMP Dharma Karya UT merupakan SMP yang lokasinya bersebelahan dengan SMA Dharma Karya UT dan bernaung di bawah Yayasan yang sama yaitu Yayasan Dharma Ananda Indonesia. SMP ini memiliki 15 guru dan 7 tenaga kependidikan dan 247 orang peserta didik (*Data Pokok SMP DHARMA KARYA UT - Pauddikdasmen, t.t.*). SMP Dharma Karya UT memiliki visi menjadi Sekolah yang Berkarakter, Berwawasan Global, dan Peduli terhadap Lingkungan.

B. Metode Pelaksanaan

1. Pengintegrasian Pendidikan Anti-Korupsi dalam Kurikulum

Metode ini mencakup pendampingan guru PPKn dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi ke dalam materi pembelajaran, silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Tahapan kegiatan meliputi pendampingan, review, dan finalisasi

materi bersama guru untuk memastikan nilai-nilai anti-korupsi, seperti kejujuran dan tanggung jawab, terintegrasi dalam pembelajaran.

2. Pengembangan Modul Pendidikan Anti-Korupsi bagi Remaja

Modul ini disusun secara interaktif untuk menarik perhatian remaja, melibatkan konsep anti-korupsi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Penggunaan multimedia, seperti video dan studi kasus, membantu memudahkan pemahaman. Modul ini didistribusikan melalui platform digital dan aktivitas ekstrakurikuler untuk meningkatkan aksesibilitas.

3. Kampanye Sosial melalui Diskusi Publik dan Lomba TikTok

Kampanye dilakukan melalui diskusi publik dengan narasumber ahli dan lomba TikTok yang mengajak siswa membuat konten kreatif terkait anti-korupsi. Kedua kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan minat siswa dalam isu anti-korupsi melalui media yang menarik bagi generasi Z.

4. Kunjungan ke KPK

Kunjungan ini memberikan pemahaman langsung kepada siswa mengenai peran KPK dalam pemberantasan korupsi, serta menginspirasi mereka untuk mengembangkan sikap anti-korupsi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengintegrasian Pendidikan Anti korupsi dalam Kurikulum

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan anti korupsi bagi generasi Z di SMP dan SMA Dharma Karya melalui integrasi dalam kurikulum, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Tiga langkah utama yang dilakukan adalah pendampingan guru, review model pengintegrasian, serta perbaikan dan finalisasi dokumen pembelajaran terkait anti korupsi.

a. Pendampingan Guru dalam Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum

Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024 pada aula SMP Dharma Karya UT. Pendampingan melibatkan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan guru mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) SMP dan SMA Dharma Karya UT. Tim pengabdian kepada Masyarakat memberikan lokakarya dan konsultasi individu dengan guru PPKn untuk mengenalkan bagaimana integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan hasil pengenalan diidentifikasi bahwa guru Mata Pelajaran PPKn pada kedua sekolah telah memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan modul mata Pelajaran PPKn untuk setiap jenjang kelas. Namun demikian RPP dan modul yang dimiliki belum disesuaikan dengan Model Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran PPKn yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai Langkah awal disepakati bahwa integrasi Pendidikan anti korupsi pada kurikulum menggunakan pendekatan pada kurikulum 2013 yang masih diberlakukan untuk kelas IX SMP dan XII SMA. Pada tahapan ini pengenalan integrasi pendidikan anti korupsi berfokus pada pembentukan sikap dan perilaku anti-korupsi, mencakup pengembangan kompetensi dasar melalui pendekatan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian. Penyajian materi oleh guru disarankan melalui diskusi, refleksi, dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dalam tahapan ini, guru diharapkan mampu memahami cara merancang Pendidikan anti korupsi melalui integrasi dalam RPP mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai output tahapan awal, peserta dalam hal ini guru mata Pelajaran diminta menyusun RPP berdasarkan panduan Modul Pendidikan Anti Korupsi Kurikulum 2013 Revisi 2016.

b. Review Model dan Finalisasi Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum

Review dilakukan pada 25 Juli 2024 di Aula SMP Dharma Karya UT dengan dihadiri guru mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan SMA Dharma Karya UT serta Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP dan SMA Dharma Karya UT. Sesi ini dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan peserta yang telah mengikuti pendampingan. Pada sesi ini, guru diminta mempresentasikan hasil pengembangan materi pembelajaran yang telah dibuat, diikuti dengan review dan masukan dari rekan-rekan dan fasilitator. Materi yang dibahas mencakup penilaian dan evaluasi terhadap efektivitas pengintegrasian anti korupsi dalam materi pembelajaran, serta diskusi mengenai model terbaik untuk menyampaikan konsep-konsep ini kepada siswa. Setelah sesi ini selesai, guru mendapatkan masukan konstruktif untuk memperbaiki dan menyesuaikan materi pembelajaran mereka agar lebih menarik dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Guru juga menjadi lebih terbuka terhadap kolaborasi dan tukar pengalaman bagaimana dengan berbagai macam pendekatan metode pengajaran yang telah diterapkan oleh fasilitator pada Pendidikan tinggi hukum.

c. Finalisasi Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi

Perbaikan dan finalisasi dilakukan secara simultan melalui pendampingan daring. Guru mata Pelajaran PPKn SMP dan SMA Dharma Karya UT melakukan revisi mandiri terhadap dokumen pembelajaran berdasarkan hasil review sebelumnya. Selain dokumen RPP, guru juga melakukan penyesuaian Modul mata Pelajaran yang telah disusun sebelumnya. RPP dan modul tersebut mengintegrasikan komponen pendidikan anti korupsi melalui berbagai

pendekatan pembelajaran seperti studi kasus, diskusi moral, dan skenario simulasi yang relevan dan kekinian dengan kehidupan siswa.

Guru memilih materi pokok “Peran lembaga penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian” dan “Peran Lembaga Penegakan Hukum Untuk Menjamin Keadilan Dan Kedamaian”. Melalui metode pembelajaran role playing, guru meminta siswa memainkan peran berdasarkan Naskah sosisodrama tentang kasus bela negara anti korupsi. Berikut penjabaran kegiatan pembelajaran pada topik tersebut:

Tabel 1. Kegiatan Pembelajaran dalam RPP Mata Pelajaran PPKn

<i>Pertemuan Ke-5</i>	
Pendahuluan	
1.	Guru mengucapkan salam.
2.	Guru meminta siswa untuk berdo'a terlebih sebelum pembelajaran
3.	Guru mengecek kehadiran siswa
4.	Guru meminta siswa untuk mengecek kebersihan lingkungan untuk menumbuhkan sikap peduli lingkungan dan kebersihan.
Kegiatan Inti	KEGIATAN LITERASI
	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik diberi membaca terlebih dahulu naskah yang telah dibuat
	COLLABORATION (KERJASAMA)
	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi kesempatan pada para pemain peran untuk berunding sebelum mereka memainkan perannya.
	COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI)
<ul style="list-style-type: none"> • Siswa menempati atau mulai berpindah pada posisi masing-masing • Sosisodrama dimulai sesuai dengan naskah yang telah disiapkan dan dipelajari oleh siswa 	
CREATIVITY (KREATIVITAS)	<ul style="list-style-type: none"> • Menilai hasil sosisodrama tersebut sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
Penutup	
1.	Guru bersama siswa menyimpulkan kejadian yang telah diperankan.
2.	Guru melakukan refleksi pembelajaran.
3.	Guru menyampaikan informasi materi dan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

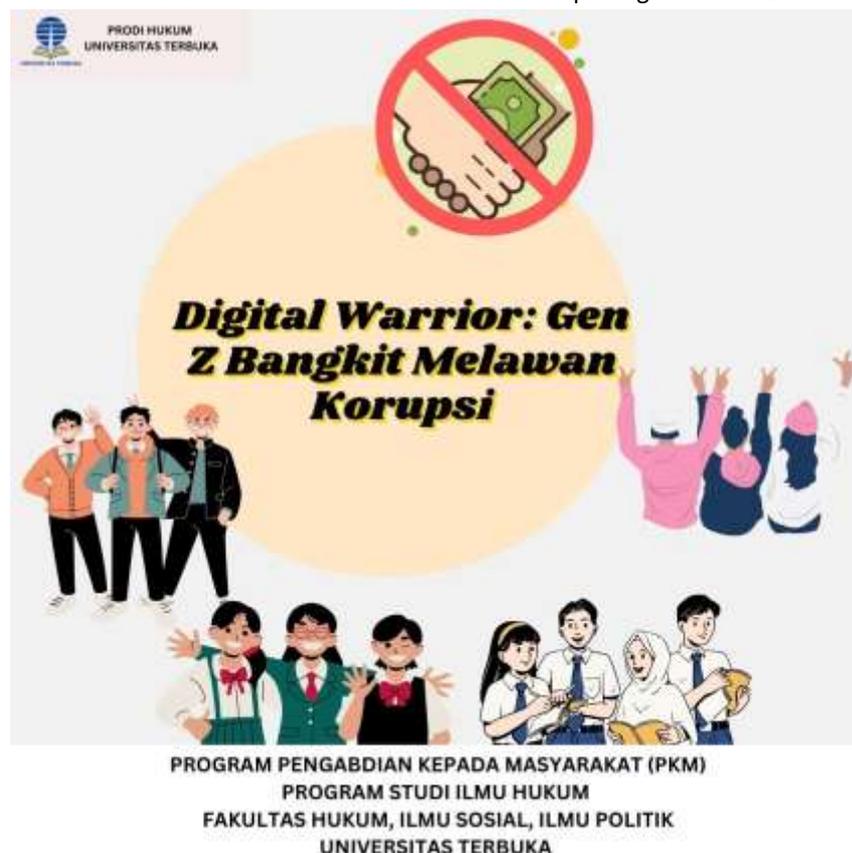
Pada tahapan ini, guru memiliki dokumen pembelajaran yang sudah final dan siap digunakan untuk mengajar nilai-nilai anti korupsi secara berkelanjutan. Mereka juga lebih percaya diri dalam menyampaikan materi anti korupsi yang terstruktur dan kontekstual.

2. Pengembangan Modul Pendidikan Anti Korupsi Bagi Remaja

Dalam pembuatan modul pendidikan anti-korupsi bagi remaja, ada tiga Langkah yang dilakukan. Pertama, memahami target audiens dengan baik. Tim pengabdian kepada Masyarakat melakukan analisis mendalam terkait preferensi, kebutuhan, dan tingkat pemahaman generasi Z terhadap isu korupsi. Modul dirancang secara interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari remaja, sehingga bisa mengaitkan nilai-nilai anti-korupsi dengan konteks yang mudah dipahami dan relevan dalam kehidupan mereka.

Kedua, menyusun materi yang komprehensif namun mudah dipahami. Modul ini mencakup konsep-konsep dasar tentang korupsi, dampaknya pada masyarakat dan negara, serta strategi pencegahan korupsi secara konkret dan praktis yang relevan dengan pengalaman remaja sehari-hari.. Karakteristik generasi z lebih condong pada gaya membaca model baru yang mengedepankan literatur yang memiliki banyak elemen unik dan mengutamakan gambar daripada teks (Csobanka, 2016). Oleh karena itu pendekatan gambar, studi kasus dapat menjadi metode efektif dalam menarik perhatian generasi z serta memperjelas konsep-konsep yang kompleks Ketiga, menentukan cara penggunaan dan penyebaran modul ini. Modul pendidikan anti korupsi harus dapat diakses dengan mudah, baik melalui platform digital, perpustakaan, maupun kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Gambar 1. Cover Modul Pendidikan Anti Korupsi Bagi Generasi Z



3. Lomba Tik Tok Bagi Siswa SMP dan SMA Dharma Karya UT

Sebagai generasi yang sangat terhubung dengan media sosial, kampanye digital dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran Gen Z mengenai pentingnya melawan korupsi. Kompetisi berupa pembuatan konten video TikTok menjadi cara yang menarik untuk menghubungkan isu korupsi dengan kreativitas para siswa. Lomba ini dapat mengajak siswa untuk membuat konten TikTok yang edukatif, kreatif, dan menginspirasi. Melalui platform yang populer di kalangan generasi Z, pesan anti-korupsi dapat tersebar lebih luas dan dengan cara yang lebih menarik. Dengan aturan yang jelas dan tujuan yang terfokus, lomba TikTok ini dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk mengedukasi, menginspirasi, dan mendorong keterlibatan aktif siswa dalam upaya pencegahan korupsi.

Gambar 2. Poster Lomba TikTok Anti Korupsi



Kompetisi ini diikuti oleh 26 grup siswa SMP dan SMA Dharma Karya UT, Dimana satu grup terdiri dari 2-5 siswa. Dari peserta yang mengunggah, dipilih 3 terbaik. Indikator penilaian meliputi sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Penilaian Lomba Tik Tok

Kriteria Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
Originalitas	Ide sangat unik dan kreatif	Ide cukup unik	Ide kurang original	Ide sangat umum
Kesesuaian Tema	Tema diangkat dengan sangat baik dan relevan	Tema diangkat dengan cukup baik	Tema kurang relevan	Tema tidak relevan
Bahasa	Bahasa sangat menarik, kekinian, dan mudah dipahami	Bahasa cukup menarik dan mudah dipahami	Bahasa kurang menarik	Bahasa sulit dipahami

4. Kampanye Pendidikan anti korupsi melalui diskusi “Digital Warriors: Gen Z Bangkit Lawan Korupsi”

Diskusi dapat menjadi platform utama untuk mendiskusikan isu-isu seputar korupsi, dampaknya pada masyarakat, serta strategi pencegahan yang relevan bagi para siswa. Diskusi menghadirkan narasumber yang berasal dari Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi yang berkompeten dalam bidang anti-korupsi. Model diskusi dirancang secara interaktif agar mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif, bertanya, dan berbagi pandangan mereka terkait isu korupsi. Mengambil tema “Digital Warriors: Gen Z Bangkit Lawan Korupsi”, diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2024 di Aula SMA Dharma Karya UT. Peserta yang hadir berasal dari 75 siswa SMP Dharma Karya, 75 siswa SMA Dharma Karya, guru pengampu mata Pelajaran PPKn dan Pelajaran lain yang terkait, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UT serta fasilitator yang berasal dari Program Studi Ilmu Hukum UT.

Gambar 2. Diskusi Digital Warriors: Gen Z Bangkit Lawan Korupsi



5. Kunjungan Siswa SMP & SMA Dharma Karya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pencegahan korupsi sejak dini. Dengan mengunjungi KPK, siswa diharapkan dapat memahami peran KPK dalam memberantas korupsi serta mendorong mereka untuk menjadi generasi yang berintegritas. Peserta kegiatan terdiri dari siswa-siswi pengurus OSIS SMP DAN SMA Dharma Karya UT. Pemilihan pengurus OSIS sebagai peserta dilatarbelakangi harapan agar pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat disebarakan oleh OSIS sebagai organisasi intra sekolah kepada siswa-siswi lain secara sistematis dan terorganisir sehingga membawa dampak yang signifikan. Berlokasi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Setiabudi, Jakarta Selatan, para siswa dikenalkan dengan tugas dan fungsi KPK, berbagai bentuk korupsi dan dampaknya terhadap Masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan oleh individu dan masyarakat. Sebagai outcome kegiatan, siswa sebagai generasi z dapat menjadi *agent of change* dalam Upaya pemberantasan korupsi melalui berbagai talenta, keterampilan dan media informasi yang mereka gunakan.

Gambar 3. Kunjungan Siswa ke Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK



D. Simpulan

Generasi Z memiliki potensi besar menjadi agen perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi. Gen Z tumbuh di era digital yang mana informasi lebih mudah diakses, dan teknologi berkembang pesat. Meskipun mereka memiliki akses luas terhadap informasi, tidak semua generasi z sepenuhnya sadar akan peran penting mereka dalam pemberantasan korupsi. Sebagai generasi yang sangat terhubung dengan media sosial, kampanye digital dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran Gen Z mengenai pentingnya melawan korupsi. Melalui *social media platform*, pesan anti-korupsi dapat disampaikan dengan cara yang kreatif dan menarik perhatian.

Namun demikian, Upaya ini tidak akan cukup tanpa disertai pelibatan lembaga pendidikan. Peningkatan kesadaran Gen Z tentang pentingnya partisipasi mereka dalam melawan korupsi harus dimulai dari sarana Pendidikan, terutama integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum. Sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan transparansi sejak dini.

Penguatan pendidikan antikorupsi bagi generasi Z di SMP dan SMA Dharma Karya UT sebagai bagian dari upaya mencapai Indonesia Emas 2045. Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum bertujuan untuk menanamkan karakter integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini. Melalui pendekatan yang melibatkan integrasi kurikulum, pengembangan modul, kampanye sosial, diskusi interaktif dan kunjungan edukatif, diharapkan terbentuk generasi muda yang sadar dan siap melawan praktik korupsi, sehingga berkontribusi pada masa depan Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Csobanka, Z. E. (2016). The Z Generation. *Acta Technologica Dubnicae*, 6(2).
<https://doi.org/10.1515/atd-2016-0012>
- Data Pokok SMAS DHARMA KARYA UT - Paudikdasmen. (t.t.). Diambil 2 November 2024, dari <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/E659C1B56B926A555AC8>
- Data Pokok SMP DHARMA KARYA UT - Paudikdasmen. (t.t.). Diambil 2 November 2024, dari <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/5F7297D9C5F7E6B1AC80>
- Ertimi, B. E., & Saeh, M. A. (2013). The Impact of Corruption on Some Aspects of the Economy. *International Journal of Economics and Finance*, 5(8), 1–8.
<https://doi.org/10.5539/ijef.v5n8p1>
- Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbulkannya - ACLC KPK. (t.t.). Diambil 2 November 2024, dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>
- Nichols, T., & Wright, M. (2018). Generational differences: understanding and exploring generation Z. *2017–2018 Officers President President-Elect*, 177.
<https://swaom.org/wp-content/uploads/2022/02/proceedings-2018-4.pdf#page=198>